

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya lembaga perbankan merupakan lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dimana bank berfungsi sebagai *agent of trust, agent of services, dan agent of development* (Sri S,dkk, 2000). Mengingat peranan bank dalam perekonomian sangat penting, maka wajar bila Drs. Mohammad Hatta menyebutkan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat. Apabila bank dapat berkembang baik maka akan dapat menopang perekonomian, karena bank yang sehat akan memperlancar lalu lintas perekonomian suatu negara. Peranan yang sangat krusial tersebut juga berlaku bagi lingkup yang lebih kecil, yaitu di daerah tingkat I. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, setiap daerah tingkat I dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam 5 tahun terakhir sistem keuangan dan perbankan menunjukkan kinerja yang positif dengan ketahanan yang tetap terjaga menurut Direktur Biro Riset Info Bank dalam info bank (2013). Secara umum risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, serta risiko likuiditas bank masih relatif rendah. Di tengah penyaluran kredit yang tumbuh meningkat, risiko kredit

masih terjaga yang terlihat dari *Non Performing Loan* (NPL) perbankan sebesar 2.02% yang merupakan NPL terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia 2013. Kinerja intermediasi perbankan dapat dipertahankan tingkat pertumbuhan yang aman bagi perekonomian. Industri perbankan masih memegang peranan terbesar dalam sistem keuangan Indonesia.

Menurut Taswan (2007) Bank Pembangunan Daerah yaitu bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah. Pendirian bank pembangunan daerah ini diperkuat oleh landasan yuridis pengembangan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan otonomi daerah akan mempengaruhi sektor perbankan di daerah. Dengan mendorong perbankan di daerah ikut berperan serta secara aktif, diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud, karena merekalah yang tahu kondisi dan situasi lingkungan di daerah (Edratna, 2007).

Bank Daerah berperan sebagai *agent of development*, di mana bank Bank Daerah memberikan fasilitas dana pembangunan daerah, baik proyek investasi maupun modal kerja (Winantuningtyastiti, 2009). Selain itu, Bank Daerah merupakan bagian dari sistem keuangan dituntut untuk dapat

menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal dan beroperasi secara efisien untuk mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan (Endri, 2009). Sehingga lembaga perbankan di tingkat daerah I secara tidak langsung berperan sebagai instrumen bagi peningkatan pembangunan ekonomi di daerah melalui kegiatan pembiayaan.

Bank Daerah memiliki relasi yang tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah dimana Bank Daerah tersebut berdiri. Tidak mengherankan bila Bank Daerah selalu melekat nama daerah asal Bank Daerah didirikan. Selain sebagai kasir Pemda dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Daerah diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah (Sunarsip,2008). Untuk itu, Bank Daerah mengalokasikan kreditnya sebagian besar pada kredit jangka panjang kepada masyarakat. Menurut Setyarini (2009), Bank Daerah merupakan alat kelengkapan ekonomi daerah yang memiliki fungsi dan peran sebagai bank umum dengan misi untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Progress (Maret 2007, h.11) Bank Daerah memiliki sejumlah kekhususan, selain lebih mengenal dan dikenal di daerah karena memiliki fokus usaha di lokasi tertentu, pemegang saham Bank Daerah adalah pemerintah daerah. Dengan dua kekhususan itu, Bank Daerah memiliki daerah dan selanjutnya bisa memaksimalkan pengelolaan dana-dana yang ada di daerah, terutama dana-dana milik pemerintah daerah. Ini merupakan peluang bagi Bank Daerah untuk berperan di daerah dibandingkan bank

umum lain. Mengingat pentingnya sebuah lembaga perbankan dalam perekonomian, maka diperlukan penilaian kinerja perbankan. Penilaian kinerja ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, dimana dengan penilaian kinerja masyarakat akan mengetahui kondisi perusahaan. Penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) menetapkan RGEC. Melalui RGEC, BI menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan keinginan BI, menurut hasil penelitian Wirnkar dan Tanko (2007) CAMEL tidak mampu menggambarkan keseluruhan kinerja bank. Penilaian kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu: 1) Profil risiko (*risk profile*) merupakan merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank, dalam penelitian ini digunakan peringkat hasil dari self assessment yang wajib dilakukan bank (PBI No.13/1/PBI/2011); 2) Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008), dimana proksi yang digunakan untuk mengukur GCG adalah

komposisi dewan komisaris independen, jumlah direksi, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Arifani (2013) dan Winda (2013) ke-empat penilaian tersebut merupakan variabel yang telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan; 3) Rentabilitas (*earnings*) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva (Marlina dan Clara, 2009) yang diukur melalui (ROA) *Return on Asset* (Anggraini, 2011; Papadogonas, 2005; Rose dalam Kuncoro dan Suhardjono, 2002) serta mengacu pada SE BI No.6/23/DPNP, ROA yang memadai berada diatas 1,25 persen; dan 4) Permodalan (*capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank, BI mewajibkan bank menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko (PBI Nomor 10/15/PBI/2008).

Return on Assets (ROA) ini di pakai untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya (Sartono,1997:131). *Return on Assets* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Widyanto,1993:53).

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan Suharjono, 2002).

Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu menunjukkan kemampuan suatu bank di dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat (Kusuno, 2003). *Loan to Deposit Ratio (LDR)* mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga.

Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO) merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi (Siamat, 2005). Biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Bank yang efisien dalam menekan biaya

operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan bank dalam mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga semakin sehat bank tersebut (Herdiningtyas, 2005).

Rasio *non performing loan* (NPL) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Herdaningtyas, 2002). Maka dalam hal ini semakin tinggi rasio NPL maka semakin rendah profitabilitas suatu bank.

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pemberian kredit atau pinjaman, sementara bank memiliki kewajiban beban bunga kepada deposan. Semakin besar rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Meningkatnya pendapatan bunga dapat memberikan kontribusi laba terhadap bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar perubahan *Net Interest Margin* (NIM) suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas

bank tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin meningkat (Mawardi,2005 ; Usman,2003 dan Sudarini,2005)

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini antara lain:

- a. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja keuangan (ROA)?
- b. Apakah terdapat pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap kinerja keuangan (ROA)?
- c. Apakah terdapat pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan (*BOPO*) terhadap kinerja keuangan (ROA)?
- d. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) kinerja keuangan (ROA)?
- e. Apakah terdapat pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja keuangan (ROA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari perumusan masalah, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja keuangan (ROA)
- b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap kinerja keuangan (ROA)

- c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO) terhadap kinerja keuangan (ROA)
- d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kinerja keuangan (ROA)
- e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap kinerja keuangan (ROA).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk praktisi dan akademisi adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi para investor dapat mempermudah melakukan investasi dan menentukan bank-bank apa saja yang memiliki prospek yang menguntungkan dengan menggunakan rasio keuangan bank yaitu CAR, BOPO, LDR, NPL, dan NIM
- 2) Bagi pengambil kebijakan perbankan bahwa kinerja perbankan dapat ditingkatkan dengan cara menerapkan Manajemen Resiko secara konsisten dan konsekuen.
- 3) Bagi Akademisi penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan gambaran penelitian mulai dari kata pengantar, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini menggambarkan teori apa saja yang digunakan untuk mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang berisikan bagaimana cara berpikir peneliti untuk penelitian ini dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab III menggambarkan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel (jika diperlukan), data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Bab ini membahas tentang gambaran subjek penelitian seperti jumlah perusahaan dan pengolahan data serta pembahasan hasil analisis

BAB V: Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya